



150 Hari Tak Ada Tindaklanjut Akan Dipidana

Rekomendasi Pemeriksaan BPK RI

PONTIANAK-RK. BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar menegaskan kepada sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pemerintahan Provinsi Kalbar dan Pemerintahan Kabupaten/Kota di Kalbar.

Untuk dapat mendaklajuti penanganan laporan hasil pemantauan tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan hasil laporan pemantauan kerugian negara/daerah semester I 2015.

"Temuan yang mungkin ditindaklanjuti diharapkan segera. Kalau tidak peraturan BPK memang masih membolehkan kalau tindaklanjuti itu ada kesulitan. Yakin masih ada waktu 30 hari. Kalau ada solusi kami beri sampai 150 hari terkait perbaikan laporan, ujar Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar, Didi Bindi Satrio saat Penyerahan Laporan Hasil Pemantauan tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan hasil laporan pemantauan kerugian negara/daerah semester I 2015 pada Pemerintah Provinsi Kalbar, Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Ujara, di Balai Putih Kantor Gubernur Kalbar.

Selasa (15/9).

Didi menegaskan, kalau sampai 150 hari itu SKPD maupun orang yang harus umpanjanya mengembalikan uang terkait tindaklanjut hasil laporan rekomendasi dari BPK RI ternyata tidak ditindaklanjuti maka pihak BPK akan menyerahkan kepada aparat penegak hukum.

"Kita ketahui penyerahan laporan hasil pemantauan tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan hasil laporan pemantauan kerugian negara/daerah merupakan amanah undang-undang. Di mana menyatakan bahwa tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK disampaikan oleh pejabat kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah Laporan Hasil Pemantauan diterima," bebernya.

BPK RI telah menyelesaikan penelaahan terhadap dokumen tindaklanjut rekomendasi apakah telah sesuai, belum sesuai ditindaklanjuti atau tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.

Sampai semester I 2015, BPK Perwakilan Provinsi Kalbar telah menghasilkan 3.711 temuan atau mengalami penambahan temuan dari hasil pemeriksaan semester

II 2014. Sebanyak 130 temuan dan 8.163 rekomendasi atau mengalami penambahan jumlah 394 rekomendasi.

"Penambahan jumlah tersebut berasal dari laporan atau atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2014," jelasnya.

Dari rekomendasi yang telah diberikan tersebut, sebanyak 5.453 rekomendasi atau sebesar 66,80 persen tindaklanjut sesuai dengan rekomendasi. Jumlah rekomendasi ini meningkat 9,30 persen dari semester lalu. Namun peningkatan rekomendasi tersebut tidak disertai dengan jumlah tindaklanjut yang belum sesuai rekomendasi.

"Sebanyak 2.413 rekomendasi tindaklanjut belum sesuai dengan rekomendasi. Selanjutnya 265 rekomendasi belum ditindaklanjuti. 32 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah," ulasnya.

Ia menambahkan, khusus enam pemerintah daerah, BPK RI Perwakilan Kalbar telah menyampaikan laporan terdapat 3.599 rekomendasi total pada pemerintah di daerah.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalbar,

Christiandy Sanjaya mengatakan, dalam pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan ada tugas untuk perencanaan pembangunan. Hal ini ada yang melaksanakan dan ada yang mengawasi pelaksanaan.

"Kita sudah mendengar ada empat kategori tindaklanjut, jadi tidak ada tempat bagi kategori tidak ditindaklanjuti setidaknya di provinsi dan kabupaten/kota. Jangankan sampai ada temuan tapi tidak mendapatkan perhatian dari pimpinan SKPD," jelasnya.

Wagub menjelaskan, diharapkan semua tindaklanjut sesuai. Kalau masuk dalam kategori tidak sesuai maka tidak ada tempat untuk tidak merespon.

"Saya tegaskan lagi untuk jajaran SKPD Provinsi tidak ada tempat bagi tidak mendaklajuti. Kita bersyukur terjadi peningkatan upaya mendaklajuti rekomendasi. Semakin hari semakin baik dan terus kita tingkatkan termasuk seluruh kabupaten/kota," paparnya.

Ia menegaskan, kalau ada indikasi tindak pidana segera dilaporkan. "Tidak ada tempat kalau ada aparat pemerintahan yang melakukan korupsi," tegasnya. (He)